



Data Sertifikasi Guru Tak Valid

Pemkot Desak Duit Langsung Ditransfer

PONTIANAK, TRIBUN - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar Alexius Akim mengungkapkan, tunjangan sertifikasi guru kerap bermasalah lantaran data yang digunakan tidak valid. Akhirnya, dana sertifikasi tak kunjung dicairkan.

Permasalahannya disampaikan saat rapat koordinasi dalam rangka analisis implikasi pencapaian opini WTP-DPP Pemprov Kalbar dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI di Auditorium BPK RI, Senin (30/9).

Kadis menyatakan, pada 2009-2010, pendataan dilakukan berjenjang dari pusat ke provinsi hingga ke kabupaten. Data ini kemudian diinput ke provinsi untuk selanjutnya diserahkan ke pusat.

"Untuk tahun berikutnya, provinsi tidak dilibatkan dalam pendataan, melainkan langsung ke kementerian. Tahun-tahun terakhir ini, tidak lagi oleh dinas kabupaten/kota melainkan guru yang bersangkutan sehingga kami kehilangan data," katanya.

Sementara itu, lanjutnya, BPK mewajibkan agar pemerintah setempat mengetahui dan menghimpun data ini. "Sehingga kami seperti mencari jarum di pasir di pinggir laut," imbuhnya.

Dia menyatakan, saat ini ada anggapan bahwa Kalbar

tidak membayar sertifikasi guru. "Dalam satu bulannya saja diperkirakan bisa mencapai Rp 4 miliar, apalagi dua bulan. Oleh karena itu, saya minta kepada kepala dinas kabupaten/kota membayar Kespeg ke kas negara. Bukan menunda, melainkan sulit dilakukannya."

ALEXIUS AKIM
Kadisdikbud Kalbar

sertifikasi dibayarkan," tuturnya. Kadisdikbud juga mengungkapkan Angka Partisipasi Kasar (APK). Pemprov, katanya, juga kebingungan lantaran setiap tahun ajaran baru, sekitar 2 ribu pelajar Kalbar melanjutkan pendidikan ke luar Kalbar. Namun, oleh BPS ini dianggap putus sekolah.

"Kapal Kalbar meningsot kalau begini. Tamat SMP banyak ke luar, sehingga data penduduk tidak keluar. Sementara dalam perhitungan dia tidak masuk ke Kalbar," tukasnya.

Keluhan mengenai sertifikasi juga disampaikan Wali Kota Pontianak Sutarmidji. Ia meminta agar dana sertifikasi guru sebaiknya ditransfer langsung ke rekening masing-masing guru agar tudingan mengenai dapannya dana sertifikasi bisa terhindari. "Sertifikasi guru ini kadang aturan harus jelas. Tunjangan Non-PNS, juga belum keluar," ujarnya.

Ia mengatakan dana sertifikasi yang selama ini masuk dalam pos belanja tidak langsung pegawai ini mengakibatkan belanjanya pegawai setiap tahunnya yang sangat besar sehingga Kota Pontianak tidak bisa mengajukan lebih banyak kuota pegawai lagi.

"Padahal kita perlu 200-300 pegawai lagi, karena belanjanya pegawai tinggi sehingga kuota penerimaan pusat hanya 50

saja," imbuhnya. Bahkan, kaitannya dengan transparansi pengelolaan keuangan, ia juga mengatakan harus ada pemahaman dan aturan yang mengatur tentang pemberian kesejahteraan pegawai bagi pejabat fungsional.

Harus ada aturan tegas mengenai ini. Guru menuntut adanya insentif, padahal tunjangan fungsional juga ada. Hal ini tidak ada insentif seperti Kespeg dan segala macamnya, imbuhnya.

Ia mengatakan, prestasi Kota Pontianak meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam dua tahun berturut-turut oleh BPK RI atas pengelolaan keuangan daerah dikatakannya merupakan komitmen pihaknya dalam mempertahankan ranah ini. (ta)